

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Triwulan II tahun 2021 menunjukkan bahwa inflasi di Kota Depok rendah, berturut-turut adalah: April (0,33), Mei (0,65). Dan pada bulan Juni (- 0,29). Dan pada bulan juni mengalami deflasi sehingga pada bulan ini menjadi pengurang Inflasi pada bulan sebelumnya merupakan tingkat inflasi kedua terendah diantara 7 Kab/Kota pantauan IHK (Indeks Harga Konsumen) di Jawa Barat. Kelompok Makanan dan Minuman masih menjadi penyumbang utama inflasi di triwulan II, yaitu pada kelompok bumbu dan sayur mayur seperti: bawang bombay, petai, jengkol, cabai rawit, ketimun, kacang Panjang, jengkol, ketela pohon, kacang panjang, kentang, buncis. Berdasarkan data di atas, kelompok utama penyumbang inflasi di Kota Depok adalah Makanan, Minuman dan Tembakau dengan komoditas utama berupa sembako. Pengendalian inflasi menjadi penting, terutama dalam rangka mempertahankan nilai uang masyarakat yang pada akhirnya akan berperan penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat terutama di masa pandemi ini. Untuk Bulan April 2021 di Kota Depok terjadi inflasi sebesar 0,33 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,17 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga dari beberapa komoditas, Komoditas dengan kenaikan harga tertinggi diantaranya adalah anggur, ayam hidup, ketela pohon, bawang bombay, petai, jeruk, ikan kembung, jengkol, baja ringan, dan ikan bandeng. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,67 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,00 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,15 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,37 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,05 persen, Kelompok Transportasi sebesar 0,11 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,02 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen, Kelompok Penyediaan Makanan, Minuman/Restoran sebesar 0,87 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,41 persen. Inflasi/deflasi terjadi karena adanya kenaikan/penurunan harga dari barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan/penurunan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut : Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,67 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,0000 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,0280 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,0217 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,0015 persen, Kelompok Transportasi sebesar 0,0176 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan sebesar 0,0000 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,0005 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 0,0000 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,0759 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,0193 persen. Laju inflasi tahun kalender sebesar 0,71 persen dan laju inflasi "year on year" (April 2021 terhadap April 2020) sebesar 1,26 persen. Pada Bulan Mei 2021 di Kota Depok terjadi inflasi sebesar 0,65 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,87. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga dari beberapa komoditas, diantaranya yaitu tarif parkir, kelapa, angkutan antar kota, ikan selar, kembang kol, kacang panjang, kentang, buncis, pir, ikan asin teri, dan minyak goreng. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,94 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,08 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,20 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,10 persen, Kelompok transportasi sebesar 1,74 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,53 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 1,07

persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,89 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 1 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, dan Kelompok Pendidikan. Inflasi/deflasi terjadi karena adanya kenaikan/penurunan harga dari barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan/penurunan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut :

Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,94 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar -1,00 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,08 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,20 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,10 persen, Kelompok Transportasi sebesar 1,74 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,53 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 1,07 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,89 persen. Laju inflasi tahun kalender sebesar 1,37 persen dan laju inflasi “year on year” (Mei 2021 terhadap Mei 2020) sebesar 2,09 persen. Sementara pada Bulan Juni 2021 di Kota Depok terjadi deflasi sebesar 0,29 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,56. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga dari beberapa komoditas. Berikut 15 komoditas dengan penurunan tertinggi, yaitu cabai merah, kelapa, petai, melon, cabai rawit, angkutan antar kota, alpukat, anggur, bawang bombay, ayam hidup, kentang, baju kaos berkerah wanita, cabai hijau, kemeja panjang katun pria, jeruk dan celana panjang jeans pria. Bulan Juni 2021 di Kota Depok terjadi deflasi sebesar 0,29 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,56. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,03 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,15 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,25 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,38 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yaitu Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,98 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,74 persen, dan Kelompok transportasi sebesar 0,43 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya, dan Kelompok Pendidikan. Inflasi/deflasi terjadi karena adanya kenaikan/penurunan harga dari barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan/penurunan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut : Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar -0,98 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar -0,74 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,03 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,15 persen, Kelompok Transportasi sebesar -0,43 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,00 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,25 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,38 persen. Laju inflasi tahun kalender sebesar 1,08 persen dan laju inflasi “year on year” (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 1,69 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

□ Angka Inflasi di Kota Depok pada Triwulan II Tahun 2021 cenderung cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka inflasi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Nasional, hal ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik Kota Depok yang merupakan daerah konsumen dan

bukan daerah produsen yang hampir 97% kebutuhannya disupply dari daerah lain. □ Selain itu Inflasi Kota Depok pada Triwulan II Tahun 2021 juga dipengaruhi adanya Bulan Ramadhan 1442 H dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain dimana secara umum selalu terjadi peningkatan permintaan (demand) atas barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, terutama volatile food yang merupakan Komoditas penyumbang inflasi terbesar dan juga beberapa administered prices. □ Disamping hal tersebut diatas, masa Pandemi Covid19 di Indonesia yang juga terjadi di Kota Depok masih berlangsung dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara proporsional, Adaptasi Kebiasaan baru untuk pencegahan, penanganan dan pengendalian Covid-19 sedikit banyak mempengaruhi jalannya Roda Perekonomian di Kota Depok dan kestabilan tingkat Inflasi di Kota Depok.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai upaya pengendalian inflasi di Kota Depok pada Triwulan II Tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya : □ Menggiatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan pertanian melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari) □ Sebagai bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru di masa Pandemi Covid 19, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok telah menyediakan Program Belanja Online di 7 (Tujuh) Pasar Tradisional yang ada di Kota Depok dengan memanfaatkan aplikasi Tokoku. □ Selain itu Dinas Kesehatan juga melaksanakan kegiatan terkait keamanan pangan, Dinas Sosial melakukan kegiatan penyaluran Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Diskominfo melakukan kegiatan Diseminasi Informasi melalui berbagai media tentang pengendalian inflasi. □ Melakukan Monitoring Kestabilan Harga dan Ketersediaan Pasokan Komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Rakyat/Tradisional dan Pasar Modern/Pusat Perbelanjaan melalui koordinasi online antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan UPT Pasar dan Manajemen Pasar Modern; □ Memastikan Sektor Esensial seperti Kesehatan, Bahan Makanan, Makanan, Minuman, Energi, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri Strategis, Pelayanan Dasar, Utilitas Publik dan Kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat beroperasi 100% dengan Pengaturan Jam Operasional dan Penerapan Protokol Kesehatan secara lebih Ketat; □ Memastikan Pusat Perbelanjaan / Supermarket / Midi Market / Mini Market yang menyediakan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat, Obat2an dan ATM tetap beroperasi agar Masyarakat dapat memenuhi Kebutuhannya dengan Pembatasan Jam Operasional, Pembatasan Kapasitas Pengunjung dan Penerapan Protokol Kesehatan secara lebih Ketat; □ Memastikan Pasar Rakyat / Pasar Tradisional tetap beroperasi agar Masyarakat dapat memenuhi Kebutuhannya dengan Pembatasan Jam Operasional, Pembatasan Kapasitas Pengunjung dan Penerapan Protokol Kesehatan secara lebih Ketat; □ Memastikan Kegiatan Restoran / Kafe / Warung Makan / Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya tetap beroperasi agar Masyarakat dapat memenuhi Kebutuhannya dengan Pola Pembelian Dine In dengan kapasitas terbatas dan Take Away atau Pesan Antar, Pembatasan Jam Operasional dan Penerapan Protokol Kesehatan secara lebih Ketat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian semua pihak. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kurang bermakna apabila diikuti oleh kenaikan inflasi yang tinggi pula, upaya pengendalian inflasi di tahun ini akan menghadapi tantangan

yang tidak ringan. Salah satunya karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. □ Kegiatan-kegiatan terkait upaya pengendalian inflasi di Kota Depok telah banyak dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok, namun demikian perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi agar upaya yang dilakukan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. □ Koordinasi semua pihak, terutama Kolaborasi dan Sinergi diantara Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok perlu terus diperkuat sehingga pihak terkait dapat mensinergikan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan. TPID Kota Depok juga diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen dalam mengupayakan pengendalian inflasi yang lebih efektif. □ Selain itu perlu semakin banyak dikembangkan Inovasi dan Kolaborasi Program dan Kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid19 dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat. □ Secara Tahun Kalender dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021 sebesar 1.08 persen. Sementara angka inflasi DKI Jakarta sebesar 0.60 persen, Jawa Barat 0.73 dan nasional 0.74 persen, namun demikian dalam pemenuhan bahan kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami kendala karena ketersediaan pasokan yang mencukupi. □ Sampai dengan Triwulan II tahun 2021 menunjukkan bahwa inflasi di Kota Depok Paling Tinggi di Jawa Barat, namun masih terkendali dan masih berada dibawah target $3 \pm 1\%$ sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021. □ Hal ini semoga bisa memberi gambaran bahwa Roda Perekonomian di Kota Depok masih bergerak secara positif walaupun tetap terdampak oleh masa Pandemi Covid 19 ini. Semoga hal ini menjadi pertanda bahwa daya beli masyarakat Kota Depok tetap terjaga untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. □ Pengendalian inflasi menjadi penting, terutama dalam rangka mempertahankan nilai uang masyarakat yang pada akhirnya akan berperan penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat terutama di masa pandemi ini.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menanggulangi berbagai isu pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2021 adalah: 1. Urgensi Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Upaya Pengendalian Inflasi di Kota Depok perlu dilakukan dengan Daerah-Daerah Produsen Volatile Food di Jawa Barat yang menjadi komoditas penyumbang inflasi utama di Kota Depok. 2. Penetapan kebijakan tarif yang diatur oleh pemerintah secara terukur dan mempertimbangkan waktu implementasinya 3. Penguatan koordinasi dan awareness Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Upaya Pengendalian Inflasi 4. Tindak lanjut BUMD Pasar 5. Penyusunan Pola Pangan Harapan, Neraca Bahan Makanan dan Prognosa Kota Depok sebagai pendukung dalam pengambilan kebijakan upaya pengendalian Inflasi di Kota Depok 6. Pengkinian data secara berkala pada Website ketahanan Pangan Kementerian Dalam Negeri, Website Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Website Aplikasi SP2KP Kementerian Perdagangan, SILINDA JABAR sebagai Early Warning System (EWS). 7. Digitalisasi transaksi perdagangan melalui TP2DD dan TPAKD Kota Depok